

Pancasila dan pluralisme Indonesia: Strategi penguatan toleransi beragama dan integrasi sosial

Santi Maya Sulistyawati

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: santimayasulistyawati12@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila; pluralisme; toleransi; integrasi sosial; multikultural.

Keywords:

Pancasila; pluralism; tolerance; social integration; multiculturalism.

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai peran penting Pancasila sebagai pondasi pluralisme di Indonesia serta mengenai pentingnya strategi yang harus dilakukan dalam memperkuat toleransi antar umat beragama dan integrasi sosial. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman berbagai suku, bahasa daerah, serta agama resmi yang telah diakui oleh pemerintah. Keberagaman ini adalah aset yang penting sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga persatuan dalam toleransi beragama. Pancasila ikut andil dalam ideologi suatu negara yang menegaskan pentingnya suatu perbedaan, maka pluralisme tidak hanya sebagai pengakuan atas keberadaan agama lain, namun juga keterkaitan aktif untuk membangun kerukunan antar umat beragama.

Artikel ini menekankan bahwa toleransi beragama dan integrasi sosial menjadi kunci yang utama untuk mencegah konflik sosial dan radikalisme yang muncul karena kurangnya apresiasi terhadap suatu perbedaan antar umat beragama. Toleransi agama yang dibahas pemerintah menjadi pedoman yang penting sebagai keseimbangan hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Selain itu, psikologi multikultural berperan aktif dalam membentuk suatu individu yang memiliki kesadaran terhadap suatu keberagaman. Dalam era globalisasi ini, Pancasila dihadapkan dengan tantangan baru dari ideologi luar dan perkembangan dalam teknologi. Refleksi yang kritis diperlukan untuk menata ulang Pancasila agar tetap relevan dalam menjawab isu-isu, seperti kesenjangan sosial hingga transformasi digital. Peran generasi muda sangat penting untuk menghadirkan gagasan yang luas, sehingga Pancasila tetap menjadi pemersatu bangsa.

ABSTRACT

This article discusses the important role of Pancasila as the foundation of pluralism in Indonesia and the importance of strategies to strengthen tolerance among religious communities and social integration. Indonesia is a nation with a diversity of ethnic groups, regional languages, and officially recognized religions. This diversity is an important asset but also a challenge in maintaining unity in religious tolerance. Pancasila contributes to the ideology of a country that emphasizes the importance of differences, so that pluralism is not only a recognition of the existence of other religions, but also an active connection to build harmony among religious communities. This article emphasizes that religious tolerance and social integration are key to preventing social conflict and radicalism that arise from a lack of appreciation for differences between religious communities. Religious tolerance, as discussed by the government, is an important guideline for balancing relations between majority and minority groups. In addition, multicultural psychology plays an active role in shaping individuals who are aware of diversity. In this era of globalization, Pancasila faces new challenges from external ideologies and technological developments. Critical reflection is needed to reorganize Pancasila so that it remains relevant in addressing issues such as social inequality and digital transformation.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari segi suku bangsa, bahasa daerah, maupun agama yang diakui secara resmi oleh negara. Keanekaragaman tersebut menjadi kekayaan sosial dan budaya yang berperan penting dalam membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain, kondisi pluralitas ini juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga keharmonisan, persatuan, dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks tersebut, Pancasila hadir sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa yang mengandung nilai-nilai pluralisme, yang menekankan sikap saling menghargai, toleransi, serta pengakuan terhadap perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama dalam masyarakat Indonesia (Soleh & Asrori, 2011).

Pluralisme adalah sikap saling menghargai perbedaan pandangan, agama, kepercayaan, etnis, budaya, dan lain-lain di lingkungan masyarakat. Pluralisme terjadi karena adanya Pluralitas (Keberagaman) dalam suatu bangsa, salah satu contoh pluralitas adalah agama. Indonesia memiliki enam agama yang diakui oleh negara yaitu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Belum lagi kepercayaan dari masing-masing agama yang belum terdata oleh negara, beragamnya agama inilah yang memunculkan sikap pluralisme di Indonesia, selain itu sikap saling menghargai antar agama juga diterapkan dalam sila pertama Pancasila. Fenomena seperti ini, di satu sisi dapat dipandang sebagai modal penting yang mampu mendorong tumbuhnya dinamika keagamaan yang konstruktif. Namun, realitas sejarah menunjukkan bahwa perbedaan yang ada justru kerap melahirkan konflik dan pertentangan. Catatan historis memperlihatkan bagaimana komunitas lintas agama sering terjebak dalam perselisihan. Perbedaan etnis maupun afiliasi keagamaan seringkali dijadikan instrumen yang efektif untuk menyalakan api perpecahan dan pertikaian (Joselyn et al., 2024).

Setiap agama memiliki tata cara ibadah yang berbeda, tetapi dari perbedaan itu tidak menutup kemungkinan terjadinya sikap pluralisme atau menghargai perbedaan yang ada dalam negara ini. Wujud nyata kerukunan atau toleransi antarumat beragama akan tercipta apabila setiap orang dapat menghargai perbedaan yang ada sesuai pengamalan sila pertama Pancasila. Tidak ada jalan lain lagi bagi manusia mengingat keberagaman adalah ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa, perpecahan akan terus terjadi apabila pluralisme ini tidak dijalankan dengan baik. Adanya keberagaman dan sikap pluralisme yang tinggi membuat rakyat Indonesia dapat memelihara dan menjalin keutuhan, kesatuan bangsa, dan negara. Beragama tidak mengurangi rasa kebangsaan, karena membela kehormatan dan kedaulatan bangsa adalah cara agama mendorong para penganutnya.

Pancasila sebagai dasar pluralisme di Indonesia berfungsi sebagai ideologi bangsa dan juga sebagai landasan moral mengenai pentingnya suatu perbedaan dalam kehidupan suatu bernegara. Dalam Pancasila terdapat suatu prinsip yang menegaskan bahwa pluralisme harus diterapkan dalam musyawarah dan pemerataan suatu wilayah. Pancasila dipandang sebagai ideologi dalam pluralisme yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Pancasila juga merajut keberagaman untuk tujuan bersama dalam menjaga persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat. Namun, di balik kekayaan tersebut, masih sering muncul gesekan antar kelompok yang disebabkan oleh sikap kurang menghargai perbedaan. Banyak individu atau komunitas yang lebih menonjolkan budayanya sendiri sambil meremehkan budaya lain. Sikap semacam ini berpotensi menimbulkan jarak sosial dan menghambat terciptanya persatuan yang kokoh. Dalam konteks kehidupan berbangsa, semua budaya memiliki kedudukan yang sama. Kesetaraan ini penting agar tidak muncul rasa iri atau kecemburuan sosial yang bisa memicu konflik. Dengan menempatkan setiap budaya pada posisi yang setara, masyarakat dapat membangun integrasi sosial yang harmonis. Toleransi menjadi kunci utama untuk menjaga keutuhan bangsa. Tanpa adanya sikap saling menghormati, persatuan akan mudah rapuh dan terancam oleh isu-isu yang memecah belah. Sebaliknya, dengan mengedepankan toleransi, perbedaan justru dapat menjadi kekuatan yang memperkaya identitas nasional. Oleh karena itu, toleransi bukan hanya nilai moral, melainkan juga strategi sosial yang harus terus dipraktikkan agar bangsa Indonesia tetap utuh, bersatu, dan mampu menghadapi tantangan keberagaman dengan bijak (Nurfauziah et al., 2024).

Pembahasan

Pluralisme Agama di Indonesia

Pluralisme tidak hanya dipahami sebagai pengakuan terhadap keberadaan berbagai kelompok sosial, budaya, dan agama dalam suatu masyarakat, tetapi juga menuntut adanya keterlibatan aktif dalam merespons realitas kemajemukan tersebut. Sikap pluralis tercermin dari kemampuan individu untuk berinteraksi secara positif dengan pihak lain yang memiliki latar belakang berbeda. Dalam konteks kehidupan beragama, pluralisme mengandung makna bahwa setiap pemeluk agama tidak cukup hanya mengakui eksistensi agama lain, tetapi juga perlu berupaya memahami persamaan dan perbedaan yang ada agar tercipta hubungan yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, pluralisme menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan yang rukun di tengah keberagaman (Zainuddin, 2010).

Sementara itu, Nurcholish Madjid berpendapat bahwa pada dasarnya semua agama memiliki prinsip yang sama, yaitu mengajarkan manusia untuk menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama-agama tersebut, baik melalui dinamika internal maupun melalui perjumpaan dengan agama lain, akan secara bertahap menemukan kebenaran masing-masing. Pada akhirnya, semua agama akan bertemu pada satu titik kesamaan yang dalam al-Qur'an disebut sebagai kalimatun sawa, yakni titik temu yang mengakui keesaan Tuhan. Dari sudut pandang positif, umat Islam yang sederhana mampu menginternalisasi pandangan optimis tentang manusia. Hal ini menjadikan mereka sebagai komunitas yang universalis, terbuka untuk belajar, dan mau menerima nilai-nilai baik dari pengalaman komunitas lain yang berbeda agama (Rahmawati & Satria, 2014).

Peristiwa Fath al-Makkah menjadi contoh nyata bagaimana Nabi Muhammad menampilkan sikap pluralis. Ketika beliau kembali ke Makkah, Nabi tidak memilih jalan balas dendam terhadap orang-orang yang pernah mengusirnya dari tanah kelahiran.

Sebaliknya, beliau memberikan kebebasan penuh kepada mereka. Sikap ini menunjukkan bahwa Nabi lebih mengutamakan pengampunan dan kedamaian daripada tuntutan kebenaran yang dipaksakan (Rahmawati & Satria, 2014).

Peran Pancasila di Era Globalisasi

Globalisasi membawa sekaligus peluang dan tantangan bagi bangsa Indonesia. Di satu sisi, keterhubungan antarnegara serta pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat, namun di sisi lain kondisi ini juga memperlihatkan adanya beragam ideologi dan nilai dalam masyarakat yang berpotensi menguji relevansi Pancasila. Agar Pancasila tetap berfungsi sebagai pedoman utama di abad ke-21, diperlukan upaya untuk menumbuhkan kritik yang membangun serta membuka ruang dialog antar generasi (Larasati, 2023).

Kritik yang bersifat mendasar membuka ruang bagi penilaian yang jujur dan transparan terhadap Pancasila dalam konteks globalisasi, baik dari sisi kelebihan maupun kekurangannya. Sikap kritis ini dapat memicu lahirnya kajian-kajian inovatif mengenai penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam menghadapi isu-isu kontemporer, seperti kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, dan perkembangan teknologi. Melalui keterlibatan kritis, masyarakat akan memperoleh pemahaman serta penghargaan yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila, sehingga relevansinya semakin kuat. Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa kritik konstruktif berbeda dengan sekadar pandangan negatif terhadap suatu ideologi. Oleh karena itu, fokus utama harus diarahkan pada eksplorasi bidang-bidang di mana Pancasila dapat memperkuat posisinya sekaligus beradaptasi menghadapi tantangan global (Febri et al., 2025).

Dialog antargenerasi ikut andil dalam meneruskan dan menafsirkan kembali nilai-nilai Pancasila lintas generasi (Lestari, 2022). Setiap generasi memiliki pengalaman serta cara pandang yang khas, yang dapat memperkaya pemahaman terhadap Pancasila. Generasi muda, yang tumbuh dalam era globalisasi, mampu memberikan perspektif baru mengenai penerapan Pancasila dalam menghadapi tantangan masa kini. Sementara itu, generasi tua dengan pengalaman hidup dan latar sejarahnya dapat menyumbangkan pandangan berharga tentang asal-usul serta perkembangan Pancasila. Pertemuan dan pertukaran gagasan antar generasi ini menumbuhkan rasa memiliki sekaligus tanggung jawab bersama untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila.

Indonesia berkomitmen untuk menjaga agar Pancasila tetap menjadi pedoman yang relevan dan kokoh di tengah arus globalisasi. Upaya refleksi serta penafsiran ulang yang dilakukan secara berkesinambungan akan memperkuat kemampuan Pancasila dalam menghadapi berbagai tantangan masa kini sekaligus menyatukan bangsa melalui kepedulian bersama terhadap prinsip-prinsip dasarnya. Pendekatan ini tidak hanya meneguhkan nilai-nilai fundamental Pancasila, tetapi juga memastikan keberlanjutannya sehingga tetap bermakna bagi generasi yang akan datang.

Strategi Penguatan Toleransi Antar Umat Beragama

Toleransi antaragama memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat serta menumbuhkan sikap saling menghargai terhadap segala bentuk

perbedaan. Ketika nilai toleransi melemah, hal itu dapat memicu munculnya persoalan sosial yang berujung pada tindakan radikal, sebagaimana terlihat dalam peristiwa teror bom pada periode 2000–2011. Fenomena tersebut mencerminkan dampak dari kurangnya sikap saling menghormati antara kelompok agama mayoritas dan minoritas.

Toleransi beragama merupakan salah satu unsur utama dalam konsep moderasi beragama. Moderasi beragama sendiri adalah kebijakan yang digagas dan diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya strategis untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme di tengah masyarakat. Esensi moderasi ini tercermin dalam berbagai sikap, antara lain konsistensi dalam berpegang pada prinsip yang lurus, keseimbangan dalam menyikapi perbedaan, egalitarianisme yang menempatkan semua orang pada posisi setara, semangat reformasi untuk memperbaiki keadaan, musyawarah sebagai sarana pengambilan keputusan bersama, kemampuan menentukan prioritas, serta sifat inovatif, dinamis, dan toleran (Fitrotulloh et al., 2024).

Implementasi toleransi antarumat beragama akan terwujud apabila setiap pemeluk agama mampu menahan diri untuk tidak merugikan kelompok lain. Dengan demikian, tercipta ikatan persaudaraan yang berlandaskan nilai kemanusiaan universal. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, sikap toleransi beragama menjadi fondasi penting untuk menjaga keteraturan, keharmonisan, dan stabilitas kehidupan sosial.

Penelitian psikologi multikultural memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat serta memperbarui nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat yang majemuk. Upaya ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan individual yang berfokus pada penguatan identitas multikultural setiap individu. Dengan identitas yang kokoh, seseorang akan lebih terbuka terhadap perbedaan, mampu menerima keragaman, dan menempatkan dirinya secara positif dalam lingkungan plural. Kedua, pendekatan relasional yang menekankan pentingnya interaksi antarbudaya dalam berbagai bentuk, baik melalui komunikasi, kerja sama, maupun aktivitas sosial. Interaksi yang intens dan sehat akan menumbuhkan sikap saling memahami, sehingga toleransi antaragama dapat berkembang secara nyata. Ketiga, pendekatan kebijakan atau politik multikultural yang menuntut adanya komitmen serius dari negara dalam mengakui serta menghargai keberadaan seluruh agama, termasuk kelompok minoritas. Kebijakan yang inklusif ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya melindungi hak-hak mayoritas, tetapi juga menjamin kesetaraan bagi semua pemeluk agama (Nurfitri, 2017)

Pembaharuan nilai toleransi beragama dalam masyarakat multikultural, jika dilihat dari perspektif pendidikan psikologi multikultural, memiliki peran yang sangat aktif karena dapat mendorong terbentuknya kepribadian multikultural pada individu. Kepribadian multikultural ini tercermin pada kemampuan seseorang untuk menilai kelompoknya sendiri secara positif sekaligus menerima keberadaan kelompok lain. Individu dengan kepribadian demikian biasanya memiliki kepekaan terhadap keragaman budaya, mampu menghargai perbedaan, serta menunjukkan sikap toleran, berorientasi universal, dan memiliki fleksibilitas dalam berpikir. Selain itu, interaksi yang terjadi dalam lingkungan multikultural memberikan dampak positif bagi perkembangan kepribadian tersebut, antara lain dengan mengurangi kecenderungan berpikir rasial, meningkatkan

kerja sama antarindividu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya toleransi antarkelompok (Nurfitri, 2017).

Integrasi Sosial Dalam Masyarakat

Dalam kajian sosiologi, teori integrasi sosial berkembang pesat melalui paradigma fungsionalisme struktural yang diperkenalkan oleh Talcot Parsons (1927–1979). Paradigma ini berasumsi bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem sosial yang senantiasa berupaya menjaga keseimbangan atau ekuilibrium. Konsep tersebut dapat dipahami melalui dua makna pokok integrasi sosial. Pertama, adanya mekanisme pengendalian terhadap konflik maupun penyimpangan sosial yang muncul dalam suatu sistem sosial tertentu. Kedua, adanya proses penyatuan berbagai unsur dalam masyarakat sehingga tercipta keteraturan sosial. Tujuan utama dari proses integrasi ini adalah menyatukan kelompok-kelompok sosial yang berbeda dengan cara mengelola perbedaan yang bersumber dari faktor teritorial, budaya, agama, kepentingan, maupun kelas sosial. Dengan demikian, integrasi sosial berfungsi untuk meminimalisasi kesenjangan yang ditimbulkan oleh perbedaan tersebut, sekaligus menciptakan kondisi masyarakat yang lebih harmonis dan tertib (Kalsum & Fauzan, 2019).

Pemahaman tersebut menjadi landasan utama bahwa integrasi sosial dalam masyarakat demokratis tidak meniadakan konflik, melainkan menganggapnya sebagai bagian tak terpisahkan dari dinamika sosial dan perubahan. Ralf Dahrendorf menegaskan bahwa konflik merupakan fenomena sosial yang senantiasa hadir dalam kehidupan manusia. Meski demikian, potensi konflik tidak seharusnya langsung dihadapkan pada kekuasaan yang bersifat hegemonik. Oleh karena itu, masyarakat bersama negara memiliki peran penting dalam mengelola potensi konflik melalui mekanisme yang dapat diterima oleh semua pihak (Kalsum & Fauzan, 2019).

Bhikhu Parekh menegaskan bahwa integrasi politik dalam masyarakat demokratis memerlukan tiga prasyarat utama. Pertama, mayoritas anggota masyarakat harus memiliki kesepakatan terhadap nilai-nilai sosial yang mendasar dan penting. Kedua, masyarakat perlu terorganisasi dalam berbagai kelompok sosial yang saling mengawasi pada aspek-aspek yang berpotensi menimbulkan masalah. Ketiga, harus ada hubungan saling bergantung antar kelompok sosial dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial secara menyeluruh.

Keberhasilan integrasi sosial dalam masyarakat demokratis ditentukan oleh adanya kepercayaan (trust), pengakuan (recognition) terhadap perbedaan serta hak bagi perbedaan untuk tetap hidup, dan kontrak moral (moral contract). Kepercayaan berfungsi mencegah kelompok yang berbeda terlibat dalam tindakan kekerasan. Pengakuan melahirkan sikap toleransi terhadap keragaman. Sedangkan kontrak moral, menurut Parekh, adalah kepatuhan terhadap nilai-nilai bersama yang menjadi dasar akses kolektif dalam masyarakat, sehingga tercipta rasa kepemilikan bersama atas nilai-nilai tersebut. Kontrak moral ini pada akhirnya menjadi aturan yang harus ditaati demi menjaga perdamaian sosial. Kepatuhan terhadap kontrak moral menempatkan masyarakat dalam posisi yang setara, dan hanya masyarakat yang setara mampu membangun kehidupan tanpa diskriminasi maupun perbedaan yang merugikan (Kalsum & Fauzan, 2019).

Integrasi sosial dalam masyarakat dapat tercapai apabila setiap unsur sosial saling terhubung secara seimbang. Selain itu, norma sosial dan adat istiadat yang baik berperan penting sebagai penopang dalam mewujudkan integrasi tersebut. Hal ini karena norma dan adat istiadat berfungsi mengatur perilaku dengan memberikan tuntunan mengenai cara bertindak secara bijaksana sesuai aturan yang berlaku, sehingga mendorong kepatuhan serta membentuk pribadi yang lebih baik.

Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan integrasi sosial diperlukan adanya pengorbanan dari setiap individu, baik berupa pengorbanan perasaan maupun materi. Pengorbanan ini menjadi langkah dasar dalam menyeimbangkan perbedaan perasaan, keinginan, ukuran, dan penilaian di masyarakat, agar tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi. Dengan demikian, norma sosial berperan sebagai acuan dan pandangan dalam bertindak serta berperilaku, sehingga dapat memberikan pedoman bagi setiap orang dalam proses bersosialisasi di tengah masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran yang penting dalam menjaga suatu keberagaman daerah dan pluralisme. Nilai-nilai yang terdapat dalam setiap sila-sila dalam Pancasila menjadi pedoman untuk kita dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Pluralisme dalam agama, budaya, dan etnis di Indonesia adalah suatu keberagaman yang harus dilestarikan dan dijaga, akan tetapi juga menghambat dan akan menjadi tantangan yang besar dalam pencegahan suatu konflik dan perdebatan. Dengan menjadikan dan mengutamakan Pancasila sebagai landasan, bangsa Indonesia dapat menanamkan sikap toleransi, saling menghargai suatu perbedaan untuk membangun kerukunan dan integrasi social dalam umat beragama.

Selain itu, pada era globalisasi ini keterlibatan Pancasila menjadi ideologi dan nilai-nilai yang akan masuk di Indonesia. Tantangan seperti adanya kesenjangan sosial dan radikalisme menuntut Pancasila agar nilai-nilainya tetap menjadi konteks yang utama. Dialog antargenerasi juga ikut andil dalam memperkuat pemahaman pancasila, agar Pancasila tidak dipandang sebelah mata saja dalam Sejarah, tetapi menjadi suatu ideologi yang relevan. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman untuk menyatukan Masyarakat dalam menghadapi dinamika global serta turut aktif dalam menjaga integrasi sosial yang memiliki landasan toleransi dan keadilan suatu negara.

Diharapkan pemerintah menjadikan pendidikan multikultural sebagai peran penting agar generasi muda bisa terbiasa dengan adanya toleransi dan saling menghargai dalam suatu perbedaan. Masyarakat juga perlu meningkatkan interaksi sosial antarbudaya melalui saling bekerjasama dalam melakukan kegiatan sosial yang melibatkan beragam kelompok agama dan juga etnis budaya.

Daftar Pustaka

- Febri, V., Putri, A., Pratiwi, I. H., Hidayatullah, A. D., Malik, M., Malang, I., Timur, J., & Kunci, K. (2025). *Kritisisme Konstruktif dan Dialog Antar Generasi: Mewujudkan Pancasila yang Relevan di Era Globalisasi*. 3.
- Fitrotulloh, M. R., Amiruddin, M., & Firdaus, A. M. (2024). *Psikologi Multikultural*. 14, 96–112.
- Joselyn, F., Manuella, V., Faradilah, R. A., Tarumanagara, U., & Joselyn, F. (2024). *Pluralisme dalam kehidupan berbangsa melalui harmonisasi pancasila*. 4(3), 400–409.
- Kalsum, A. U., & Fauzan, F. (2019). Integrasi sosial dalam membangun keharmonisan masyarakat. *JAWI*, 2(1).
- Larasati, R. H. (2023). *Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Fondasi Pendidikan Indonesia untuk Menghadapi Tantangan Abad 21*. 02(November), 8–13.
- Lestari, D. I. (2022). Kajian Pendidikan Pancasila Dalam Revitalisasi Moral Bangsa Pada Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 3(1), 57. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i1.51938>
- Nurfauziah, A., Dewi, D. A., & Ardiansyah, M. I. (2024). *Urgensi Toleransi untuk Mempertahankan Integrasi Bangsa*. 94–100.
- Nurfitri, A. D. (2017). Toleransi Beragama dengan Tapa Slira dan Empan Papan. In *Revitalisasi Toleransi Beragama Berbasis Kearifan Lokal*.
- Rahmawati, E. S., & Satria, M. H. (2014). Implementasi toleransi beragama di pondok pesantren Darut Taqwa Pasuruan. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 6(1), 95–106. <https://repository.uin-malang.ac.id/1366/>
- Soleh, A. K., & Asrori, H. (2011). *Pluralisme agama dalam pandangan elit agama-agama di Malang Raya*. <https://repository.uin-malang.ac.id/6059/>
- Zainuddin, M. (2010). *Pluralisme agama: Pergulatan dialogis Islam-Kristen di Indonesia*. UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/1174/>